

TABEL 3.6

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	92.64	7.36
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	95.10	7.36
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	100	92.99	7.36
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	100	97.09	7.36
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	97.12	7.36
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	100	99.97	7.36
	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	95.06	7.36
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	95.00	7.36
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100	99.35	7.36
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	81.36	7.36
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100	80.75	7.36
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	100.00	7.36
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	100.00	7.36
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	83.53	7.36
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	95.09	7.36
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100	49.76	7.36
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	95.01	7.36

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efesiensi
1	2	3	4	5
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100	99.85	7.36
	Penyediaan bahan logistik kantor	100	93.54	7.36
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	99.77	7.36
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	99.90	7.36
	Fasilitasi kunjungan tamu	100	89.08	7.36
	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	99.96	7.36
	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	95.33	7.36
	<i>Pengadaan Mebel</i>	100	94.23	7.36
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100	95.85	7.36
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	92.00	7.36
	Penyediaan jasa surat menyurat	100	91.14	7.36
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	65.21	7.36
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100	98.34	7.36
	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	92.89	7.36
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	78.82	7.36
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	95.83	7.36
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	100	99.74	7.36
	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i>	100	80.55	7.36

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100	80.55	7.36
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100	80.55	7.36
	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	80.07	7.36
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100	69.15	7.36
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	100	93.99	7.36
	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100	78.87	7.36
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	98.73	7.36
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	98.70	7.36
	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	100	98.85	7.36
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	95.81	7.36
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	99.63	7.36
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	99.63	7.36
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	91.28	7.36
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100	91.28	7.36

Malili, 26 Januari 2026
Mengetahui,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5

Camat Malili,

H. HASIMNING , ST. MM

Pangkat:Pembina TK. I / Ivb

NIP. 19730826 200312 1 002

Tabel 1.3
 Jumlah Pejabat fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
 Pada Kantor Camat Malili
 Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		-	-					-	-	-	-	-	-		
2	Fungsional Umum														
	Jumlah	-	-					-	-	-	-	-	-		

Keterangan

Malili, 26 Januari 2026

Mengetahui,
 Camat Malili,

H. HASIMNING , ST. MM

Pangkat: Pembina Utama / IVb
 NIP. 19730826 200312 1 002

:

Tabel : 3.7
Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga (MoU)
yang Dilaksanakan Sampai dengan Tahun 2025
Kantor Camat Malili
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Instansi Mitra MoU	Tanggal MoU	Nomor MoU	Perihal MoU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Malili, 26 Januari 2026

Mengetahui,
Camat Malili,

H. HASIMNING , ST. MM

Pangkat: Pembina TK. I / IVb
NIP. 19730826 200312 1 002

TABEL 3.2
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI LKPJ
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kec. Malili	Kecamatan	Kec. Malili		BELANJA					
2.12.01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	100%	100%			
				<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	100%			
2.12.01.2.01.01				Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dok	2 Dok			
2.12.01.2.01.02				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok			
2.12.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok			
2.12.01.2.01.07				Evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Laporan	7 Laporan			
2.12.01.2.02.				Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%			
2.12.01.2.02.01				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	21 Orang	21 Orang			
2.12.01.2.02.07				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
2.12.01.2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100			
2.12.01.2.03.06				Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan			
2.12.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100			
2.12.01.2.05.03				Pendaatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dok	12 dok			
2.12.01.2.05.11				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 orang	5 orang			
2.12.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen			
2.12.01.2.06.01				Penyedian komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4 Paket	4 Paket			
2.12.01.2.06.02									
2.12.01.2.06.04				Penyediaan bahan logistik kantor	4 Paket	4 Paket			
2.12.01.2.06.05				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200 Paket	200 Paket			
2.12.01.2.06.06				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 Dokumen	8 Dokumen			
2.12.01.2.06.08				Fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan			
7.01.01.2.06.0009				Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Laporan	12 Laporan			
2.12.01.2.07				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
2.12.01.2.07.05				<i>Pengadaan Mebel</i>	1 Unit	1 Unit			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI LKPJ
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.01.01.2.07.0006				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unut	2 Unit			
2.12.01.2.07.09									
2.12.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100			
7.01.01.2.08.0001				Penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	4 Laporan			
7.01.01.2.08.0002				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan			
7.01.01.2.08.0004				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
7.01.01.2.09.0002				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	8 Unit	8 Unit			
7.01.01.2.09.0006				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	17 unit	17 unit			
7.01.01.2.09.0009				Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	3 Unit	3 Unit			
7.01.02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%			
7.01.02.2.04.0001				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4 Dokumen	4 Dokumen			
7.01.03				PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%			
7.01.03.2.01.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan			
7.01.03.2.01.0003				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan			
.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas			
7.01.04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI LKPJ
					Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan			
7.01.04.2.01.0002				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan			
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan			
7.01.05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%			
7.01.05.2.01.0008				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen			
7.01.06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%			
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan			

Mengetahui,
Camat Malili,

H. HASIMNING , ST. MM
Pangkat:Pembina TK.I / Ivb
NIP. 19730826 200312 1 002

TABEL 3.6
REALISASI KEUANGAN PADA URUSAN KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7
2	BELANJA	4,394,407,703	4,094,304,042.00	93.17		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,965,512,503	3,733,513,698.00	94.15		
2	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	25,869,600	24,682,837	95.41	Perubahan prioritas kegiatan menyebabkan perjalanan dinas yang direncanakan tidak terlaksana.	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	13,340,000	12,405,121	92.99	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	4,405,500	4,277,316	97.09	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,253,800	4,131,400	97.12	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	3,870,300	3,869,000	99.97	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog dan perjalanan dinas	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,713,942,241	2,579,740,604	95.06		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2,682,284,291	2,548,288,391	95.00	Terdapat sisa Anggaran dikarenakan adanya pegawai yang pensiun	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	31,657,950	31,452,213	99.35		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7
2.12.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	21,713,800	17,665,826	81.36	Terdapat Sisa Anggaran Bendahara Penerimaan sudah tidak dibayarkan mulai Bulan April 2025 sejak diberhentikannya program Retribusi Daerah oleh Bapak Bupati Luwu Timur	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	21,713,800	17,665,826	81.36	Terdapat Sisa Anggaran Bendahara Penerimaan sudah tidak dibayarkan mulai Bulan April 2025 sejak diberhentikannya program Retribusi Daerah oleh Bapak Bupati Luwu Timur	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	750,000	750,000	100.00		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	750,000	750,000	100.00		
2.12.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	44,691,000	26,876,622	60.14	Terdapat sisa Anggaran dari belanja barang dan jasa dan kontribusi Bimtek	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10,235,000	9,732,422	95.09	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7
2.12.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	34,456,000	17,144,200	49.76	Terdapat sisa Anggaran dari Belanja Kontribusi Bimtek Kontribusi yang tidak digunakan karena kurangnya pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	402,981,450	382,869,361	95.01		
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10,030,000	10,015,000	99.85		
2.12.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	18,417,700	17,228,400	93.54		
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,130,250	10,106,600	99.77	adanya sisa anggaran disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9,780,000	9,770,000	99.90	adanya sisa anggaran disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	172,250,000	153,446,000	89.08	adanya sisa anggaran disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06.09	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	182,373,500	182,303,361	99.96		
2.12.01.2.07	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	146,250,000	139,421,550	95.33	Rasionalisasi anggaran dan ketidak responsifan penyedia dalam proses negosiasi disebabkan oleh terjadinya fluktuasi harga	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	47,000,000	44,289,000	94.23	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	99,250,000	95,132,550	95.85	Rasionalisasi anggaran dan ketidak responsifan penyedia dalam proses negosiasi disebabkan oleh terjadinya fluktuasi harga	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	503,104,412	462,848,886	92.00		
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	20,272,500	18,477,168	91.14	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai
2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	91,871,912	59,911,718	65.21	Konsumsi listrik atau internet ternyata lebih rendah dari yang diproyeksikan. disebabkan adanya ruangan yang masih dalam pembentahan ruangan termasuk instalasi listriknya, sehingga penghematan pada jam operasional kantor, atau penggunaan internet lebih efisien	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	390,960,000	384,460,000	98.34		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	106,210,000	98,658,012	92.89		
2.12.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	31,410,000	24,757,512	78.82	Terdapat Sisa Anggaran dikarenakan standar harga pajak kendaraan Roda empat di DPA sangat tinggi namun pada saat di bayarkan di samsat ada kebijakan pemerintah yaitu pemotongan pajak 20%	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18,000,000	17,250,000	95.83		
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	56,800,000	56,650,500	99.74		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11,132,400	8,967,188	80.55	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog , Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Makan Minum yang tidak digunakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11,132,400	8,967,188	80.55		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	11,132,400	8,967,188	80.55		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	320,370,500	256,517,104	80.07		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78,730,500	65,945,104	83.76		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=3*100	6	7
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	32,419,500	22,419,500	69.15	Adanya belanja pada makan minum yang tidak digunakan pada kegiatan pra musrembang	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46,311,000	43,525,604	93.99		
	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	241,640,000	190,572,000	78.87	Adanya Belanja kegiatan yang tidak digunakan karena beberapa Anggota Linmas mengundurkan diri diterima di salah satu Perusahaan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17,470,000	17,120,501	98.00	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
2.12.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	13,108,500	12,941,948	98.73		
2.12.04.2.01.02	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10,528,500	10,391,546	98.70	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	2,580,000	2,550,402	98.85	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan <i>realistic focus</i>
	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	4,361,500	4,178,553	95.81		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4,361,500	4,178,553	95.81	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62,658,300	62,426,551	99.63		
2.12.04.2.03	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	62,658,300	62,426,551	99.63		
2.12.04.2.03.05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	62,658,300	62,426,551	99.63		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7
2.12.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17,264,000	15,759,000	91.28		
2.12.05.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	17,264,000	15,759,000	91.28		
2.12.05.2.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	17,264,000	15,759,000	91.28	Terdapat sisa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja tidak digunakan dan Negosiasi pada proses E-Katalog	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan

Malili, 26 Januari 2026
 Mengetahui,
 Camat Malili,

H. HASIMNING , ST. MM

Pangkat: Pembina TK. I / IV b
 NIP. 19730826 200312 1 002

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Kantor Camat Malili
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	II-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	III-a	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2
4	III-b	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	III-c			1	1									1	1
6	III-d			3											3
7	IV-a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	IV-b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Jumlah	1	-	2	7	-	-	1	1	-	-	-	-	4	8

Keterangan

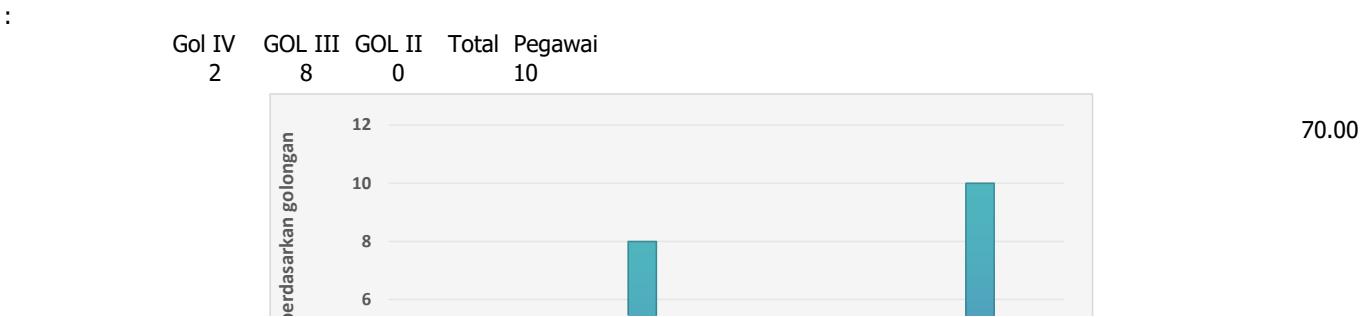
Jumlah Pejabat Struktural yang berada di Kantor Camat Malili berjumlah 8 Orang yang terdiri:
Camat
Sekretaris
Kepala Seksi 4 orang
Kasubag berjumlah 2 Orang

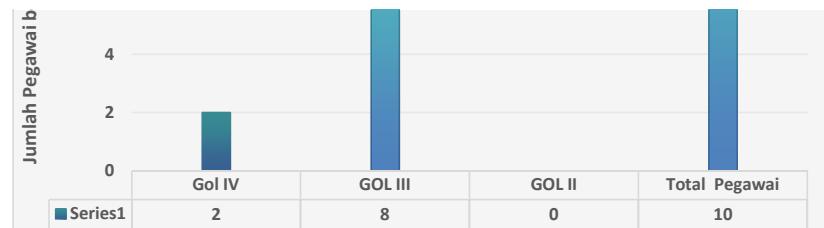
Malili, 26 Januari 2025

Mengetahui,
Camat Malili,

H. HASIMNING , ST. MM

Pangkat:Pembina TK. I / IVb
NIP. 19730826 200312 1 002





Tabel 1.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Kantor Camat Malili
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	IV	1	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	III	-	-	2	7	1	-	1	1	-	-	-	-	4	8
3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4	CPNSD	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
5	Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
6	PPPK	-	-	2	3	-	1	1	3	-	-	-	-	3	7
7	Upah Jasa	-	-					2		1	1	1	0	2	1
		1		4	12	2	2	4	4	1	1	1			

Keterangan :

Jumlah Pegawai PNS Kantor camat Malili berjumlah 12 Orang dan PPPK 11 Orang

Malili, 26 Januari 2026

Jumlah Upah Jasa 6 Orang yang terdiri dari:

- Pembersih TPI 1 Orang Mengetahui,
- Sopir berjumlah 1 Orang Camat Malili,
- Pembersih Pasar berjumlah 2 Orang
- Security berjumlah 1 Orang
- Ceaning servis berjumlah 1 Orang

H. HASIMNING , ST. MM

Pangkat:Pembina TK. I / IVb

NIP. 19730826 200312 1 002

Tabel 2.1
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Kator Camat Malil

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/Berkurang	
		APBD	APBD -P	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	4,218,794,550	4,394,407,703	175,613,153	4.00
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,774,153,650	3,965,512,503	191,358,853	4.83
1.	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	37,245,350	25,869,600	- 11,375,750	-43.97
1.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	24,836,000	13,340,000	- 11,496,000	-86.18
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	4,458,500	4,405,500	- 53,000	-1.20
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,577,100	4,253,800	- 323,300	-7.60
4	Evaluasi kinerja perangkat daerah	3,373,750	3,870,300	496,550	12.83
2.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2,532,002,883	2,713,942,241	181,939,358	6.70

1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2,499,587,883	2,682,284,291	182,696,408	6.81
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	32,415,000	31,657,950	757,050	-2.39
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>20,004,000</i>	<i>21,713,800</i>	<i>1,709,800</i>	<i>7.87</i>
1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	20,004,000	21,713,800	1,709,800	7.87
4	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>3,000,000</i>	<i>750,000</i>	<i>2,250,000</i>	<i>-300.00</i>
1.	<i>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	3,000,000	750,000	2,250,000	-300.00
5	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>62,029,255</i>	<i>44,691,000</i>	<i>17,338,255</i>	<i>-38.80</i>
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10,746,255	10,235,000	511,255	-5.00
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	51,283,000	34,456,000	16,827,000	-48.84
6	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>428,006,750</i>	<i>402,981,450</i>	<i>25,025,300</i>	<i>-6.21</i>

1.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	9,480,000	10,030,000	550,000	5.48
3.	Penyediaan bahan logistik kantor	18,417,700	18,417,700	-	0.00
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,377,550	10,130,250	- 1,247,300	-12.31
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9,780,000	9,780,000	-	0.00
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	131,540,000	172,250,000	40,710,000	23.63
7.	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	247,411,500	182,373,500	- 65,038,000	-35.66
7	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-	<i>146,250,000</i>	146,250,000	100.00
1.	<i>Pengadaan Mebel</i>	-	<i>47,000,000</i>	47,000,000	100.00
2.	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	-	99,250,000	99,250,000	100.00
8	<i>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>586,105,412</i>	<i>503,104,412</i>	<i>- 83,001,000</i>	<i>-16.50</i>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	19,573,500	20,272,500	699,000	3.45
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	91,571,912	91,871,912	300,000	0.33
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	474,960,000	390,960,000	- 84,000,000	-21.49

9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	105,760,000	106,210,000	450,000	0.42
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	31,710,000	31,410,000	- 300,000	-0.96
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	17,250,000	18,000,000	750,000	4.17
3.	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	56,800,000	56,800,000	-	0.00
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14,239,400	11,132,400	- 3,107,000	-27.91
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14,239,400	11,132,400	- 3,107,000	-27.91
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	14,239,400	11,132,400	- 3,107,000	-27.91
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	326,197,500	320,370,500	- 5,827,000	-1.82
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	84,557,500	78,730,500	- 5,827,000	-7.40

1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	37,049,500	32,419,500	-	4,630,000	-14.28
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47,508,000	46,311,000	-	1,197,000	-2.58
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	241,640,000	241,640,000		-	0.00
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	241,640,000	241,640,000	-	-	0.00
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18,726,100	17,470,000	-	1,256,100	-7.19
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	14,003,500	13,108,500	-	895,000	-6.83
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11,423,500	10,528,500	-	895,000	-8.50
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,580,000	2,580,000	-	-	0.00

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,722,600	4,361,500	-	361,100	-8.28
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	4,722,600	4,361,500	-	361,100	-8.28
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64,838,300	62,658,300	-	2,180,000	-3.48
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>64,838,300</i>	<i>62,658,300</i>	-	2,180,000	-3.48
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	64,838,300	62,658,300	-	2,180,000	-3.48
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20,639,600	17,264,000	(3,375,600)	-	-19.55
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>20,639,600</i>	<i>17,264,000</i>	(3,375,600)	-	-19.55
1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	20,639,600	17,264,000	(3,375,600)	-	-19.55

Ket Alokasi Anggaran Pada Kantor Camat Malili sebelum perubahan sebesar Rp.4.218.794.550,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 4.394.407.703,- atau bertambah sebesar Rp. 175.613.153,- atau 4,00 %, perubahan rincian pada belanja operasi sebelum perubahan sebesar Rp. 3.774.153.650,- setelah perubahan 3.965.512.503,- belanja modal sebelum perubahan 43.000.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 146.250.000,-

Malili, 26 Jar

Mengetahui,
Camat Malili,

H. HASIMN]

Pangkat : Pem
NIP. 1973082€

i

Keterangan
7
<i>Penambahan anggaran sebesar Rp 175.613.153 yang diperuntukkan untuk belanja pengadaan mebel berupa kursi Pejabat dan kursi Rapat, belanja peralatan dan mesin lainnya</i>

<i>Penyesuaian anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam provinsi</i>

<i>Penyesuaian anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam provinsi</i>
<i>Penambahan anggaran Gapok PNS dan dan pengurangan Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK</i>

Penambahan anggaran Gapok PNS dan pengurangan Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK

Adanya Pengurangan Karena Bendahara Penerimaan sudah tidak dibayarkan mulai Bulan April 2025 sejak diberhentikannya program Retribusi Daerah oleh Bapak Bupati Luwu Timur

Pengurangan anggaran pada kontribusi bimtek

Pengurangan Anggaran pada kontribusi bimtek

Penambahan anggaran untuk perbaikan instalasi listrik.

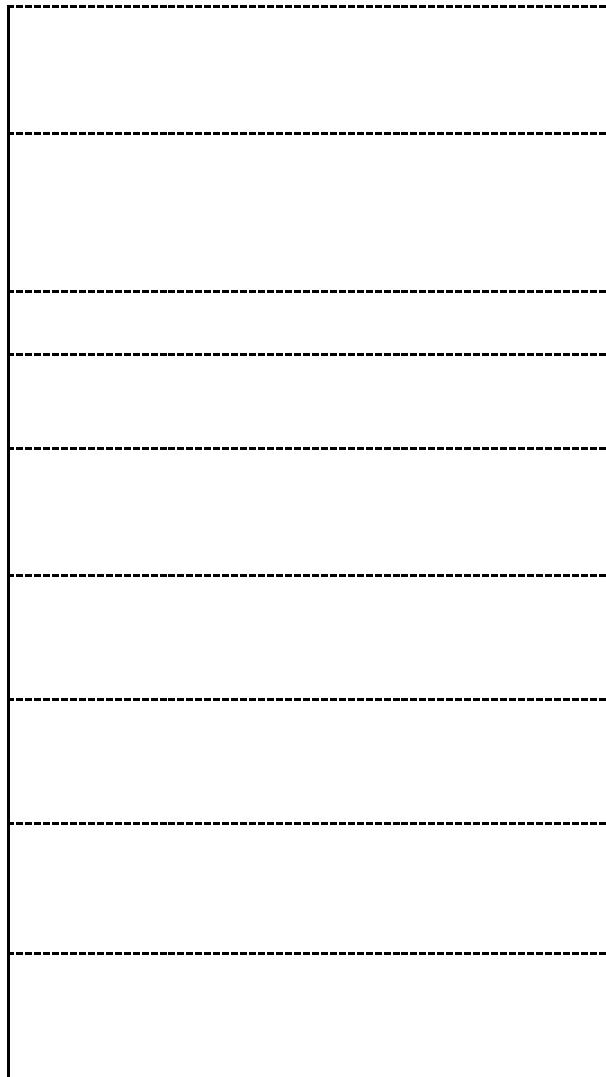
Pengurangan anggaran perjalanan dinas luar dan dalam Daerah

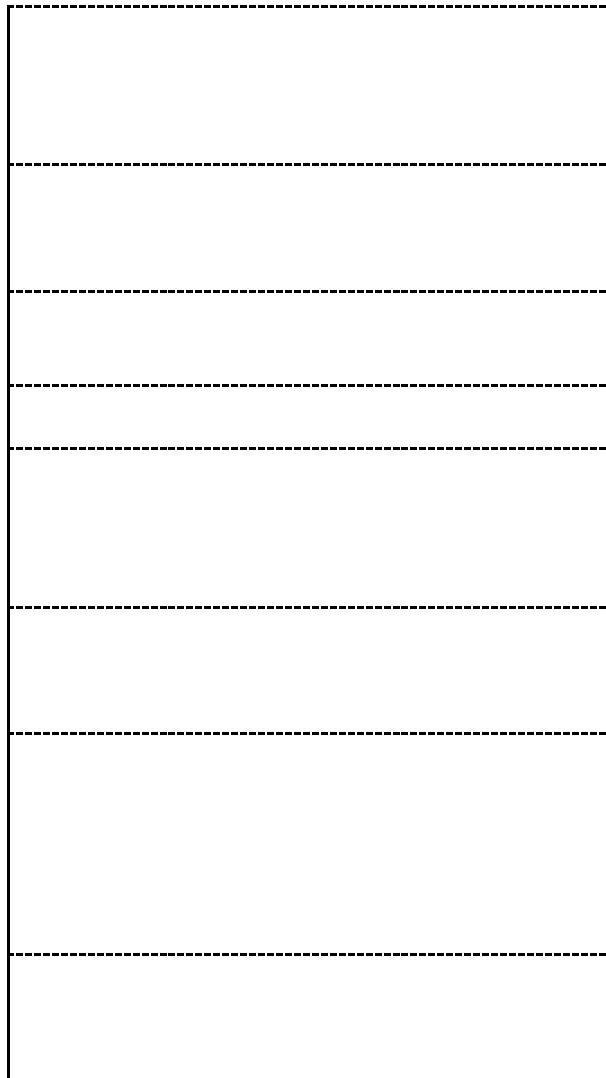
Penambahan anggaran untuk pembelian kursi Pejabat dan Kursi futura guna memenuhi kebutuhan penambahan dalam ruang kerja dan ruangan Rapat

Penambahan anggaran dalam rangka pembelian.....

Penyesuaian kebutuhan anggaran pada belanja internet berdasarkan kontrak dengan penvedia

Penyesuaian anggaran untuk kebutuhan internet kantor berdasarkan kontrak dengan Telkomsel







ıuari 2026

ING , ST. MM

bina TK. I / IV b
5 200312 1 002

TABEL 3.10
PENGHARGAAN YANG DITERIMA UNTUK URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
TAHUN 2025

NO	SKPD	NAMA PENGHARGAAN	PARTISIPASI DALAM BIDANG	PEMBERI PENGHARGAAN
1	Kantor Camat Malili	-	-	-

Malili, 26 Januari 2026

Mengetahui,
Camat Malili,

H. HASIMNING , ST. MM

Pangkat:Pembina TK. I / Ivb
NIP.19730826 200312 1 002